



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL
PENDIDIKAN TINGGI

Jl. Jenderal Sudirman, Pintu I Senayan – Jakarta 10270
Telepon No. (021) 57946063 Faks. 57946062

SURAT EDARAN

Nomor : 170/D/T/2010

Tanggal : 17 Februari 2010

Hal : Perubahan perguruan tinggi menjadi Badan Hukum Pendidikan

Yth. 1. Semua Pemimpin Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara
2. Semua Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri
di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional

Sehubungan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan pada tanggal 16 Januari 2009, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan menyatakan bahwa satuan pendidikan tinggi yang telah didirikan oleh Pemerintah berbentuk badan hukum pendidikan.
2. Menteri Pendidikan Nasional telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 32 Tahun 2009 tentang Mekanisme Pendirian Badan Hukum Pendidikan, Perubahan Badan Hukum Milik Negara Atau Perguruan Tinggi, Dan Pengakuan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Sebagai Badan Hukum Pendidikan.

Mengingat jumlah perguruan tinggi negeri termasuk perguruan tinggi badan hukum milik negara (PT BHMN) adalah 84 (delapan puluh empat), untuk memudahkan pembahasan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Sekretariat Negara, perlu adanya pengaturan prioritas perguruan tinggi untuk menjadi Badan Hukum Pendidikan Pemerintah (BHPP) sebagai berikut.

1. Semua PT BHMN agar mengusulkan perubahan bentuk menjadi BHPP paling lambat bulan Juni tahun 2010.
2. Semua perguruan tinggi negeri yang telah menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (PTN PPK-BLU) agar mengusulkan perubahan bentuk menjadi BHPP paling lambat bulan Agustus tahun 2010.
3. Perguruan tinggi negeri selain sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 agar mengusulkan perubahan bentuk menjadi BHPP sesuai dengan jadwal dan kategori pengelompokan (terlampir).
4. Bagi perguruan tinggi yang menghendaki segera beralih menjadi BHPP dapat mengajukan kepada Menteri Pendidikan Nasional dengan mengabaikan pengaturan waktu sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, dan angka 3.

5. Usul perubahan perguruan tinggi negeri menjadi BHPP sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 4 diajukan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan kepada Menteri Pendidikan Nasional melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi c.q. Direktorat Kelembagaan dengan tembusan disampaikan kepada Sekretariat Jenderal c.q. Biro Hukum dan Organisasi.

Selanjutnya untuk memperlancar proses perubahan perguruan tinggi menjadi BHPP dimaksud, Kementerian Pendidikan Nasional cq Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi akan memberikan fasilitasi antara lain pendampingan.

Demikian Surat Edaran ini untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

a.n. Menteri Pendidikan Nasional
Direktur Jenderal,

TTD

Fasli Jalal
NIP 19530901 198203 1 001

Tembusan Yth:

1. Menteri Pendidikan Nasional;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional.

LAMPIRAN SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
NOMOR 170/D/T/2010 TANGGAL 17 FEBRUARI 2010

PENGELOMPOKAN PERGURUAN TINGGI UNTUK BERUBAH BENTUK
MENJADI BADAN HUKUM PENDIDIKAN PEMERINTAH

A. PERGURUAN TINGGI BADAN HUKUM MILIK NEGARA

No.	Nama Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara	Keterangan	Jadwal
1.	Universitas Indonesia (UI)	Peraturan Pemerintah Nomor 152 Tahun 2000 tanggal 26 Desember 2000	Juni 2010
2.	Universitas Gadjah Mada (UGM)	Peraturan Pemerintah Nomor 153 Tahun 2000 tanggal 26 Desember 2000	Juni 2010
3.	Institut Pertanian Bogor (IPB)	Peraturan Pemerintah Nomor 154 Tahun 2000 tanggal 26 Desember 2000	Juni 2010
4.	Institut Teknologi Bandung (ITB)	Peraturan Pemerintah Nomor 155 Tahun 2000 tanggal 26 Desember 2000	Juni 2010
5.	Universitas Sumatera Utara (USU)	Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2003 tanggal 11 November 2003	Juni 2010
6.	Universitas Pendidikan Indonesia (UPI)	Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2004 tanggal 30 Januari 2004	Juni 2010
7.	Universitas Airlangga (UNAIR)	Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2006 tanggal 14 September 2006	Juni 2010

B. PERGURUAN TINGGI YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLA KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM

No.	Nama Perguruan Tinggi Negeri	Keterangan	Jadwal
1.	Universitas Diponegoro (UNDIP)	Badan Layanan Umum Penuh Kepmenkeu Nomor 259/KMK.05/2008 Tanggal 15 September 2008	Agustus 2010
2.	Universitas Padjadjaran (UNPAD)	Badan Layanan Umum Penuh Kepmenkeu Nomor 260/KMK.05/2008 Tanggal 15 September 2008	Agustus 2010
3.	Universitas Negeri Malang (UM)	Badan Layanan Umum Penuh Kepmenkeu Nomor 279/KMK.05/2008 Tanggal 24 September 2008	Agustus 2010
4.	Universitas Hasanuddin (UNHAS)	Badan Layanan Umum Penuh Kepmenkeu Nomor 280/KMK.05/2008 Tanggal 24 September 2008	Agustus 2010
5.	Universitas Brawijaya (UNIBRAW)	Badan Layanan Umum Penuh Kepmenkeu Nomor 361/KMK.05/2008 Tanggal 17 Desember 2008	Agustus 2010

No.	Nama Perguruan Tinggi Negeri	Keterangan	Jadwal
6.	Universitas Negeri Semarang (UNNES)	Badan Layanan Umum Penuh Kepmenkeu Nomor 362/KMK.05/2008 Tanggal 17 Desember 2008	Agustus 2010
7.	Institut Teknologi Sepuluh November (ITS)	Badan Layanan Umum Penuh Kepmenkeu Nomor 363/KMK.05/2008 Tanggal 17 Desember 2008	Agustus 2010
8.	Universitas Negeri Surabaya (UNESA)	Badan Layanan Umum Penuh Kepmenkeu Nomor 50/KMK.05/2009 Tanggal 27 Februari 2009	Agustus 2010
9.	Universitas Mulawarman (UNMUL)	Badan Layanan Umum Penuh Kepmenkeu Nomor 51/KMK.05/2008 Tanggal 27 Februari 2009	Agustus 2010
10.	Universitas Sebelas Maret (UNS)	Badan Layanan Umum Penuh Kepmenkeu Nomor 52/KMK.05/2008 Tanggal 27 Februari 2009	Agustus 2010
11.	Universitas Lampung (UNILA)	Badan Layanan Umum Penuh Kepmenkeu Nomor 129/KMK.05/2009 Tanggal 21 April 2009	Agustus 2010
12.	Universitas Negeri Yogyakarta (UNY)	Badan Layanan Umum Penuh Kepmenkeu Nomor 130/KMK.05/2009 Tanggal 21 April 2009	Agustus 2010
13.	Universitas Negeri Gorontalo (UNIGOR)	Badan Layanan Umum Penuh Kepmenkeu Nomor 131/KMK.05/2009 Tanggal 21 April 2009	Agustus 2010
14.	Universitas Bengkulu (UNIB)	Badan Layanan Umum Penuh Kepmenkeu Nomor 186/KMK.05/2009 Tanggal 15 Mei 2009	Agustus 2010
15.	Universitas Sriwijaya (UNSRI)	Badan Layanan Umum Penuh Kepmenkeu Nomor 186/KMK.05/2009 Tanggal 26 Mei 2009	Agustus 2010
16.	Universitas Negeri Jakarta (UNJ)	Badan Layanan Umum Penuh Kepmenkeu Nomor 440/KMK.05/2009 Tanggal 18 November 2009	Agustus 2010
17.	Universitas Andalas (UNAND)	Badan Layanan Umum Penuh Kepmenkeu Nomor 501/KMK.05/2009 Tanggal 17 Desember 2009	Agustus 2010
18.	Universitas Jenderal Soedirman (UNSOED)	Badan Layanan Umum Penuh Kepmenkeu Nomor 502/KMK.05/2009 Tanggal 17 Desember 2009	Agustus 2010

C. PERGURUAN TINGGI NEGERI KATEGORI BESAR

No.	Nama Perguruan Tinggi Negeri	Kriteria		Kategori	Jadwal
		Jumlah Mahasiswa	Jumlah Dosen		
1.	Universitas Syiah Kuala	25924	1507	Besar	2010
2.	Universitas Negeri Medan	19024	917	Besar	2010
3.	Universitas Riau*	19749	1021	Besar	2010
4.	Universitas Negeri Padang	27654	939	Besar	2010
5.	Universitas Jambi	10548	718	Besar	2010
6.	Universitas Terbuka	317786	359	Besar	2010
7.	Universitas Jember	18765	963	Besar	2010
8.	Universitas Tanjungpura	15985	2140	Besar	2010

No.	Nama Perguruan Tinggi Negeri	Kriteria		Kategori	Jadwal
		Jumlah Mahasiswa	Jumlah Dosen		
9.	Universitas Lambung Mangkurat	13158	1109	Besar	2010
10.	Universitas Sam Ratulangi	13845	1713	Besar	2010
11.	Universitas Tadulako	12534	1164	Besar	2010
12.	Universitas Haluoleo*	15813	952	Besar	2010
13.	Universitas Negeri Makassar	12230	915	Besar	2010
14.	Universitas Udayana	16263	1639	Besar	2010
15.	ISI Yogyakarta	1694	324	Besar	2010
16.	ISI Surakarta	1007	211	Besar	2010

D. PERGURUAN TINGGI NEGERI KATEGORI SEDANG

No.	Nama Perguruan Tinggi Negeri	Kriteria		Kategori	Jadwal
		Jumlah Mahasiswa	Jumlah Dosen		
1.	Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	9079	376	Sedang	2011
2.	Universitas Palangkaraya	8651	767	Sedang	2011
3.	Universitas Negeri Manado	5043	883	Sedang	2011
4.	Universitas Pattimura	8492	1115	Sedang	2011
5.	Universitas Mataram	9295	944	Sedang	2011
6.	Universitas Khairun Ternate	5581	449	Sedang	2011
7.	Universitas Nusa Cendana	6570	887	Sedang	2011
8.	Universitas Cendrawasih	6296	561	Sedang	2011
9.	ISI Denpasar	832	214	Sedang	2011
10.	Universitas Pendidikan Ganesha	8985	426	Sedang	2011

E. PERGURUAN TINGGI KATEGORI KECIL

No.	Nama Perguruan Tinggi Negeri	Kriteria		Kategori	Jadwal
		Jumlah Mahasiswa	Jumlah Dosen		
1.	Universitas Malikussaleh	3757	354	Kecil	2012
2.	Universitas Trunojoyo	3454	329	Kecil	2012
3.	Universitas Negeri Papua	3055	471	Kecil	2012
4.	ISI Padang Panjang	565	217	Kecil	2012
5.	STSI Bandung	694	1318	Kecil	2012
6.	Sekolah Tinggi Intelijen Negara	216	45	Kecil	2012
7.	Politeknik Negeri Lhokseumawe	1653	273	Kecil	2012
8.	Politeknik Negeri Medan	4164	293	Kecil	2012
9.	Politeknik Negeri Padang	2566	271	Kecil	2012
10.	Politeknik Pertanian Negeri Padang	497	126	Kecil	2012
11.	Politeknik Negeri Sriwijaya	3904	361	Kecil	2012
12.	Politeknik Negeri Lampung	977	136	Kecil	2012
13.	Politeknik Negeri Jakarta	4848	282	Kecil	2012
14.	Politeknik Negeri Media Kreatif Jakarta	76	-	Kecil	2012
15.	Politeknik Negeri Bandung	3476	475	Kecil	2012
16.	Politeknik Manufaktur Negeri Bandung	697	119	Kecil	2012
17.	Politeknik Negeri Semarang	3394	355	Kecil	2012
18.	Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya	969	94	Kecil	2012

No.	Nama Perguruan Tinggi Negeri	Kriteria		Kategori	Jadwal
		Jumlah Mahasiswa	Jumlah Dosen		
19.	Politeknik Elektronika Negeri Surabaya	1633	123	Kecil	2012
20.	Politeknik Negeri Malang	3521	368	Kecil	2012
21.	Politeknik Negeri Jember	1906	156	Kecil	2012
22.	Politeknik Negeri Pontianak	1883	231	Kecil	2012
23.	Politeknik Negeri Banjarmasin	1674	167	Kecil	2012
24.	Politeknik Negeri Samarinda	2301	237	Kecil	2012
25.	Politeknik Pertanian Negeri Samarinda	380	80	Kecil	2012
26.	Politeknik Negeri Manado	1639	311	Kecil	2012
27.	Politeknik Negeri Ujung Pandang	2516	249	Kecil	2012
28.	Politeknik Pertanian Negeri Pangkep	541	163	Kecil	2012
29.	Politeknik Negeri Ambon	1666	221	Kecil	2012
30.	Politeknik Perikanan Negeri Tual	268	77	Kecil	2012
31.	Politeknik Negeri Bali	1476	341	Kecil	2012
32.	Politeknik Negeri Kupang	545	150	Kecil	2012
33.	Politeknik Pertanian Negeri Kupang	792	142	Kecil	2012

Catatan:

- Kategori besar:
jumlah mahasiswa > 10000 = 16 Perguruan Tinggi
- Kategori sedang:
jumlah mahasiswa 5000 sampai dengan < 10000 = 10 Perguruan Tinggi
- Kategori kecil:
jumlah mahasiswa < 5000 = 33 Perguruan Tinggi
- Jumlah dosen tidak dijadikan kategori karena jumlah mahasiswa yang besar belum tentu jumlah dosen juga besar.
- *) Masih menunggu persetujuan Menteri Keuangan untuk menerapkan PK BLU.

a.n. Menteri Pendidikan Nasional
Direktur Jenderal,

TTD

Fasli Jalal
NIP 19530901 198203 1 001